

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai Prosedur Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Padang dapat disimpulkan bahwa :

1. Perkembangan yang terjadi pada pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Padang dari tahun 2020 s/d 2022 yaitu mengalami kenaikan kebutuhan perabotan pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan terjadinya kegiatan kantor pada masa *new normal* dan mengharuskan setiap ruangan di BPKAD Kota Padang memiliki alat pelindung diri anti Covid-19 yaitu seperti menyediakan masker dan *handsanitizer*, lalu BPKAD Kota Padang juga meningkatkan kebersihan pada kantor agar dapat meminimalisir terjangkit Covid-19 dan pada 2 tahun tersebut juga adanya belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan untuk kendaraan dinas operasional/lapangan.
2. Anggaran yang dikeluarkan untuk pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Padang sudah sesuai dengan tata cara pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yaitu pada pemeliharaan adanya nama barang, spesifikasinya, jenis pekerjaan atau pemeliharaan, bahan atau barang yang digunakan, biaya pemeliharaan, dan pihak yang melaksanakan pemeliharaan, sedangkan untuk pengamanan diberlakukannya pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum.
3. Anggaran yang dikeluarkan untuk pengamanan BMD BPKAD Kota Padang pada

tahun 2020 s/d 2022 yaitu sebesar Rp. 7.650.793.770, Rp. 9.006.707.008, dan Rp. 9.317.490.440 lalu untuk anggaran yang dikeluarkan untuk pengamanan dari tahun 2020 s/d 2022 yaitu sebesar Rp.511.235.300, Rp. 1.630.481.504 dan Rp. 1.683.666.845

4. Pada tahun 2021 dan 2022 dana anggaran pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Padang mengalami kenaikan karena adanya belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan untuk kendaraan dinas operasional/lapangan, pembelian ATK, makan dan minum rapat dan pembelian perabot kantor seperti *handsanitize*, pengahrum ruangan, kapur barus dan lainnya yang diperlukan untuk tiap ruangan dan keperluan pada kamar mandi. Dan juga kegiatan yang dilakukan pada pengamanan adalah membayar panitia pelaksana kegiatan keamanan, tim pengadaan barang dan jasa, tim penilai, Non-PNS, uang lembur untuk PNS dan non PNS, belanja ATK penunjang kegiatan pengaman, belanja bahan material untuk pembuatan plank nama, membayar jasa notaris, membayar premi asuransi BMD, makan dan minum, dan membayar belanja perjalanan dinas dalam daerah. belanja untuk bahan komputer dan belanja iuran jaminan/ asuransi untuk kendaraan dinas.

5. BPKAD Kota Padang memperoleh dana anggaran tersebut dari Pendaptan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Provinsi.

Kendala yang terjadi pada saat pengumpulan data pengamanan dan pemeliharaan BPKAD Kota Padang yaitu :

1. Data pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Padang tidak ditemukan pada bagian sekretariat, dan membuat penulis menganalisis data

DPA (Dokumen Pedoman Anggaran) SKPD BPKAD Kota Padang sesuai dengan tahun yang ingin di analisis.

2. Pegawai yang mengurus data-data pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah BPKAD Kota Padang tersebut adalah pegawai baru, sehingga beliau masih kesulitan untuk mencari data-data tahun 2020-2022

5.2 Saran

1. BPKAD Kota Padang diharapkan agar melatih atau memberi panduan pada pegawai baru tentang apa yang harus dikerjakan dan letak dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pekerjaannya, sehingga tidak kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang akan datang.
2. BPKAD Kota Padang melengkapi dan meng-*update* SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pada web BPKAD Kota Padang guna membuat transparansi dengan masyarakat.
3. BPKAD Kota Padang diharapkan dapat membatasi masuknya mahasiswa/siswa yang akan menjalankan magang sesuai dengan jangka waktu yang diminta dikarenakan jika pegawai magang terlalu banyak maka akan membuat pekerjaan untuk pegawai magang tersebut tidak efektif dan tidak produktif.
4. BPKAD Kota Padang diharapkan agar menjalin komunikasi yang baik antar pimpinan dan karyawan guna meminimalisir *miscommunication*.

